



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kebijakan Pengadaan Aparatur Sipil Negara

Aba Subagja, S.Sos., M.AP., M.H.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur

Jakarta, 31 Oktober 2023

**#bangga
melayani
bangsa**

Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara

1

UU No. 5 Tahun 2014
tentang **Aparatur Sipil
Negara**

2

PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No.
17 Tahun 2020 tentang **Manajemen
PNS**

PP No. 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen PPPK

ASN sebagai **profesi** yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan **wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit** dalam pelaksanaan Manajemen ASN





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Manajemen ASN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Prinsip Meritokrasi

Setiap **Warga Negara Indonesia** mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau PPPK setelah memenuhi persyaratan. Penerimaan PNS dan PPPK dilaksanakan melalui **penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain** yang dibutuhkan dalam jabatan.

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PNS

PP 11 TAHUN 2017
MANAJEMEN PNS jo. PP
17 TAHUN 2020



PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

PPPK

PP 49 TAHUN 2018
MANAJEMEN PPPK

PNS & PPPK

Mengisi Jabatan Pemerintahan

&

Melaksanakan Tugas Pemerintahan



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Tujuan dan Prinsip Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara

Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik.

1

3

Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi.

Mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2

4

Memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.

Pengadaan CASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KEBIJAKAN PENGADAAN ASN TAHUN 2023

Peraturan Menteri PANRB No. 27/2021 tentang Pengadaan CPNS

1

Keputusan Menteri PANRB No. 651 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi CPNS

Peraturan Menteri PANRB No. 14 /2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional

1

Keputusan Menteri PANRB No. 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK JF

2

Keputusan Menteri PANRB No. 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK JF Guru

3

Keputusan Menteri PANRB No. 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi

4

Keputusan Menteri PANRB No. 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK JF



Pemenuhan Jabatan Teknis sesuai Prioritas Nasional

**peningkatan nilai tambah, lapangan pekerjaan, investasi di sektor riil, dan industrialisasi



Pemenuhan Sektor Pelayanan Dasar

*RPJMN 2020-2024, Lampiran I, BAB 2 Hal. 31; Rapat Teknis PIC

Penyusunan Kebijakan COL ASN, Feb 2021.

1

Pendidikan

2

Kesehatan

3

Penegakan Hukum



ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN ASN TAHUN 2023



01



Fokus pada pelayanan dasar (GURU DAN TENAGA KESEHATAN) dengan seoptimal mungkin **menyelesaikan masalah Non-ASN**



02



Memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta **digital dan data scientist** secara terukur



03



Merekrut **CPNS** dengan sangat selektif



04



Mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan **terdampak oleh transformasi digital**



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Mekanisme Pengadaan CPNS

*PermenPANRB No. 27/2021 juncto PermenPANRB No. 52/2021 tentang Pengadaan CPNS

FORMASI UMUM

Pelamar Umum

FORMASI KHUSUS

1. Putra/putri lulusan terbaik/cumlaude (minimal 10%)
2. Diaspora
3. Putra/putri papua dan papua barat
4. Penyandang disabilitas (minimal 2%)

SELEKSI CAT

Kelulusan berdasarkan NAB dan berperingkat terbaik

*NAB disesuaikan dengan jenis formasi



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Mekanisme Pengadaan PPPK

*PermenPANRB No. 14/2023 tentang Pengadaan PPPK dalam proses pengundangan

FORMASI

Ketentuan diatur
dalam Kepmen

FORMASI DISABILITAS

Kuota minimal 2%
dari total Formasi

**Mekanisme Seleksi PPPK
diatur dalam Keputusan
Menteri PANRB**

Dampak Terhadap Pendidikan Sekolah Swasta

1. Berkurangnya Guru pada Sekolah Swasta
2. Pemberhentian Guru Swasta Karena Menjadi PPPK
3. Guru Swasta yang diberhentikan Namun Belum mendapatkan Tempat pada Sekolah Negeri
4. Sekolah Swasta potensi Kehilangan Guru terbaik di Sekolahnya.

Tahapan Seleksi Aparatur Sipil Negara

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
2. Tes Inteligensia Umum (TIU);
dan
3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

PNS

Seleksi
Administrasi

Seleksi
Kompetensi
Dasar
(SKD)

Seleksi
Kompetensi
Bidang
(SKB)



menilai kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan.

PPK

Seleksi
Administrasi

Seleksi
Kompetensi

Wawancara

mempertimbangkan integritas dan moralitas

1. Kompetensi Teknis;
2. Kompetensi Manajerial; dan
3. Kompetensi Sosial Kultural.

1 E-MATERAI: peserta banyak mengeluhkan terjadinya *error* pada pembubuhan e-materai

2 SISTEM PENDAFTARAN FORMASI KHUSUS GURU: pada beberapa instansi, formasi yang tersedia tidak dapat dilamar oleh peserta yang *eligible* sesuai ketentuan pada KepmenPANRB 649/2023

3 FORMASI EKS THK-2/TENAGA NON ASN: Tidak Tersedianya Formasi Jabatan untuk Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN yang tidak diusulkan oleh KLD



Memastikan Kebutuhan CASN

- 1 Pemetaan Kebutuhan Instansi Sesuai dengan Kualifikasi dan Kebutuhan Jabatan
- 2 Identifikasi Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan Unit Kerja Bagi Pelamar Yang Berasal dari Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN
- 3 Memperhatikan dan Mengikuti Tahapan Pengadaan CASN sesuai dengan Jadwal Yang Telah Ditetapkan





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengangkatan PPPK

Keterbatasan
Anggaran Untuk
Membayar
Penghasilan

- Kurangnya DAU
- Perbedaan Persepsi

Keterbatasan
Usulan
Formasi KLD

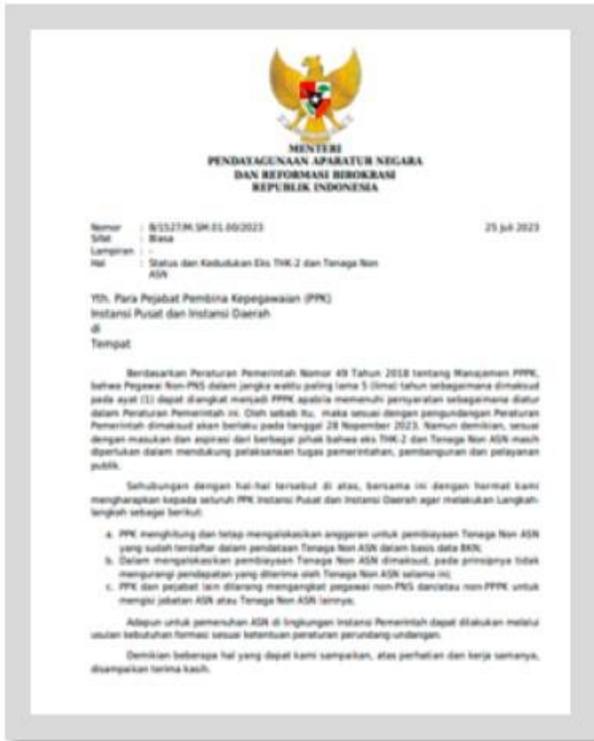
- Tidak ada Peta Jabatan Terkait ABK
- Kelebihan SDM dalam 1 Jabatan
- Data Yang Tidak Valid

Kualifikasi dan
Jenis Jabatan Yang
Tidak Sesuai/Tidak
Memenuhi Syarat
Jabatan

- Keterbatasan Jenis Jabatan
- Persyaratan Minimal Tidak Terpenuhi dalam Jabatan

Perencanaan & Pengadaan CASN

Surat B/1527/M.SM.01.00/2023 perihal Status dan Kedudukan Eks Thk-2 dan Tenaga Non ASN



01

PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN;

02

Dalam mengalokasikan pembiayaan Tenaga Non ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh Tenaga Non ASN selama ini

03

PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau Tenaga Non ASN lainnya



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

TERIMA KASIH

 @kempnrb

 @kemenpanrb

 www .menpan.go.id

  @Kementerian PANRB